

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENSOSIALISASIKAN PADA MASYARAKAT DI
PEMILIHAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH
(Studi Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

**Oleh:
MUHAMMAD ARIF
NPM: 1921020564**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FALKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENSOSIALISASIKAN PADA MASYARAKAT DI
PEMILIHAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH
(Studi Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapai Tugas- tugas dan Mamenuhi Syarat-
syarat Guna Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1
Dalam Hukum Tata Negara (S.H.)



**Oleh:
Muhammad Arif
NPM: 1921020564**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki M.Ag
Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta M.H.I**

**FALKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفًا = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan prinsip rechtsstaat dan menolak machtsstaat (kekuasaan belaka). Pemerintahan didasarkan pada sistem konstitusi, bukan absolutisme. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga nasional, tetap, dan mandiri diatur oleh tujuh prinsip penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk kemandirian, kesetaraan, integritas, dan profesionalitas. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mewakili rakyat. Dalam konteks ini, KPU Provinsi Lampung, bersifat tetap dan mandiri, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di wilayah tersebut. Peran KPU diatur oleh perundang-undangan, seperti UU Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Pemahaman kedaulatan tertinggi pada rakyat, sebagaimana disampaikan dalam UUD 1945, memotivasi pembentukan KPU untuk mewakili hak rakyat dalam pemilihan umum. Meskipun anggotanya memiliki masa jabatan tertentu, KPU dianggap tetap dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Perspektif hukum Islam, terutama fiqh siyasah, menjadi landasan pemahaman terhadap peran KPU. Kasman Singodimedjo mencatat bahwa kedaulatan rakyat tidak selalu mutlak benar, sehingga perlu disesuaikan dengan tujuan dan kehendak Allah. Firman Allah dalam Al-Quran menegaskan kekuasaan Allah yang mutlak. Penelitian yang diusulkan akan fokus pada implementasi KPU Provinsi Lampung dalam Pemilu 2019, dengan perspektif fiqh siyasah. Tujuannya adalah mengevaluasi sejauh mana KPU mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan bagaimana upaya KPU dalam menjaga sistematika pemilihan.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode field research (penelitian lapangan) dimana penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Permasalahan ini layak untuk dikaji karena terkait dengan peran KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Provinsi Lampung.

Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Upaya KPU Provinsi Lampung dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 mencakup kerja sama dengan stakeholder, pendidikan pemilih melalui media sosial, rumah pintar pemilu, dan agen demokrasi, serta

menyampaikan informasi melalui media massa. Mereka juga memberikan kesempatan kepada semua warga, termasuk penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi. 2) Dalam perspektif Fiqh Siyasah, KPU Provinsi Lampung berupaya memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam, dengan pemimpin dianggap sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan sesama manusia. Kepemimpinan harus berlandaskan pada kepentingan rakyat. 3) Faktor pendukung KPU Provinsi Lampung dalam pemilihan DPRD 2019 meliputi sumber daya manusia yang memadai dan kerjasama dengan relawan demokrasi, yang meningkatkan partisipasi masyarakat. Faktor penghambatnya termasuk politik uang dan golput.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Kepala Daerah, Fiqh Siyasah





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721)703289

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Arif
NPM : 1921020564
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pada Masyarakat Di Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Komisi Pemiliha Umum Provinsi Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

BandarLampung, 02 Mei 2024

Penulis,



Muhammad Arif

NPM. 1921020564



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721)703289

PESETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pada Masyarakat Di Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif Fiqih Siyash (Studi Di Komisi Pemiliha Umum Provinsi Lampung)”

**Nama : Muhammad Arif
NPM : 1921020564
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Muhammad Zaki M.Ag

Dr. Hervin Yoki Pradikta M.H.I

NIP.197012282000031002

NIP.19880218201801 1 002

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara**

Frenki M.Si

NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pada Masyarakat Di Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Komisi Pemiliha Umum Provinsi Lampung)”** Di Susun Oleh Muhammad Arif, NPM: 1921020564, Progran Studi Hukum Tata Negara. Telah Diujikan Pada Sidang Munaqosah Di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal : **Senin, 13 mei 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si 

Sekretaris : Pramudya Wisesha, S.H 

Penguji I : Prof.Dr.Hj. Erina Pane, S.H, M.Hum 

Penguji II : Dr. Muhammad Zaki M.Ag 

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta M.H.I 



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ
اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۚ ۱۲۵

“ Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia muhsin (orang yang berbuat kebaikan) dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif? Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih(-Nya)”

(Q.S An Nisa : 125)



PESEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Alhamdulillah atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan menyemangati saya menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk kedua orang tua saya yang tersayang dan tercinta, Bapak Sugimin dan Ibu Lastun yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang mendidik dan selalu memberikan dorongan serta do'a restu untuk keberhasilan saya.
2. Kakak dan Adik saya, Mbak Atikah Faiqoh, Adek Yunus Banu Hisan. Terimakasih telah menjadi penyemangat dan terimakasih atas jasa-jasa yang tak terhingga dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Terima kasih untuk diri sendiri, Muhammad Arif. Terima kasih sudah menepikan ego dan memilih untuk bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terima kasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan pernah memutuskan untuk menyerah, kamu hebat Muhammad Arif.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, terutama pembimbing skripsi, seluruh dosen, Prodi Hukum Tatanegara (Siyâsah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah dan civitas academica UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Arif , lahir pada tanggal 20 November 2000 di Kelurahan Argopeni, Kecamatan Sumberejo , Kabupaten Tanggamus . Putra pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sugimin dan Ibu Lastun.

Pendidikan penulis dimulai dari jenjang Madarasah Ibtidaiyah Margodadi lulus pada tahun 2013, melanjutkan ke Madarasah Tsanawiyah Margodadi pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke SMA N 1 Sumberejo lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyâsah Syar'iyah) lulus pada tahun 2024.

Penulis juga aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa dan Orgabisasi Ekternal , diantaranya :

1. UKM Paduan Suara Mahasiswa Bahana Swarantika Choir
2. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Syariah Bendahara Umum (2022 – 2023)

BandarLampung, 02 Mei 2024

Penulis

Muhammad Arif
NPM.1921020564

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT.yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Terdapat terselesaikan. Shalawat beserta salam juga tak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyâsah Syar’iyah), Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi dan Bapak Fathul Mu’in, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (Siyâsah Syar’iyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Muhammad Zaki, M.H.I . selaku Pembimbing I dan Bapak Dr Hervin Yoki Pradikta ,M.H.I selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggungjawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan staff pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis.
6. Kepala dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Prodi Hukum

Tatanegara (Siyâsah Syar'iyah) angkatan 2019, khususnya HTN kelas J.

Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia yang melimpah, dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dan senang hati penulis akan menerimanya. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT. penulis serahkan segalanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 02 Mei 2024

Penulis

Muhammad Arif
NPM.1921020564



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN LITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus Dan Sub Fokus.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terhalu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqih Siyasah	17
1. Pengertian Fiqh Siyasyah	17
2. Dasar Hukum fiqh Siyasah	20
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasyah	21
4. Prinsip fiqh Siyasah.....	23
B. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah.....	29
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	29
2. Pengertian <i>Al- Sulthah Al-Tanfidziyyah</i>	30
3. Ruang Lingkup <i>Al- Sulthah Al-Tanfidziyyah</i>	30

BAB III OBJEK PENELITIAN

A. KPU di Indonesia	35
B. Gambaran Umum KPU Provinsi Lampung	38

1. Sejarah KPU Provinsi Lampung.....	38
2. Visi Dan Misi KPU Provinsi Lampung	39
3. Anggota Komisioner KPU Provinsi Lampung	40
C. Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pada Masyarakat Di Pemilihan Dprd Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.....	42
a. Pemanfaatan Jejaring Sosial	43
b. Rumah Pintar Pemilu	45
c. Relawan Demokrasi.....	47

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pada Masyarakat Di Pemilihan Dprd Provinsi Lampung Tahun 2019.....	57
B. Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pada Masyarakat Di Pemilihan Dprd Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Renstra KPU.....	41
3.2.Tingkat Pendidikan Pegawai KPU Provinsi Lampung	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan pada masyarakat di Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif *Fiqih Siyasa*” (studi di Komisi pemilihan umum provinsi lampung) .Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah, sebagai berikut:

1. Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Menurut Djimli Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul “Konstitusi Dan Konstitusionalisme” Indonesia mendefinisikan KPU sebagai berikut: KPU adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.¹Dalam skripsi ini KPU disingkat menjadi KPU.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
Pasal 1

3. Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.

4. Perspektif

Perspektif adalah upaya dalam melukiskan sesuatu pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang sudah terlihat oleh mata telanjang dengan tiga dimensi yakni panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, perspektif juga mempunyai makna lain yaitu sebagai sebuah sudut pandang-pandangan.

5. *Fiqh siyasah*

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.² Berdasarkan penjelasan dalam penegasan-penegasan di atas yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

²Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Social: Di Rasas Islamiyah III* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2010).25

Indonesia Tahun 1945. Dalam penjelasan, secara implisit dan eksplisit dapat dipahami bahwa Indonesia ialah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), dan tidak atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pada penjelasan berikutnya ditegaskan pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dalam hal ini tentunya ada suatu sistem yang mengatur tata cara pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Pemerintahan yang bersifat terpimpin akan mengatur seluruh lembaga yang ada di negara tersebut (Indonesia), dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga yang independent yaitu KPU.³

KPU sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuh prinsip penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) seperti yang ditetapkan oleh the international idea. Pertama, KPU diharuskan mempunyai kemandirian yang mana tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun. Kedua, KPU dituntut untuk memberikan perlakuan yang sama, tidak memihak, dan adil sehingga tidak memberikan keuntungan pihak lain. Ketiga, KPU mempunyai integritas yang diartikan sebagai kesesuaian antara tindakan dan perilaku seorang atau lembaga penyelenggara pemilu. Keempat, memberikan ketersediaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu terkait dengan suatu kebijakan publik serta pembentukannya. Kelima, efisiensi dan efektifitas guna menghindari kekacauan dan kerusakan hukum dan tata tertib. Keenam, KPU dikelola dengan prinsip profesionalitas. Sebab diperlukan orang yang mempunyai keahlian, terlatih, dan berdedikasi. Ketujuh, memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun peserta pemilu. Pelayanan ini merupakan tolak ukur untuk menilai KPU sebagai penyelenggara pemilu.⁴

Dalam undang-undang dasar tahun 1945 (UUD 1945) sendiri disebutkan secara tegas mengenai pemilihan umum yang

³Marzuki Wahid dan Humadi, *Fiqh Madzhab Negara* (Yogyakarta: LKSI, 2002).20

⁴Yulianto; Veri Junaidi, *August Mellaz, Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu* (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, n.d.).13

diselenggarakan oleh suatu KPU. Sebagaimana halnya negara demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Perwujudan KPU sebagai lembaga KPU yang disebutkan dalam UUD 1945, dibentuk untuk menjadi wadah yang mewakili rakyat. Hak rakyat yang dapat terwakili dengan adanya KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum, dirasa dapat menjalankan amanat dari dasar konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945.

Dalam berbagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan bersifat “tetap” dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun anggotanya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sementara sifat “mandiri” dimaksudkan dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu, KPU bersikap mandiri dan pasal 22e ayat 5 disebutkan: “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Penetapan “nasional” terdapat makna bahwa KPU seba bebas dari pengaruh pihak manapun serta dengan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas sesuai perundang-undangan yang berlaku.⁵ Penjelasan dari pasal 22e ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 di atas kembali menegaskan peran KPU beserta sifat-sifatnya. Dengan haluan tersebut, KPU dituntut untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Penjelasan yang disebutkan dimaksudkan agar KPU tidak keluar dari aturan hukum mengenai tugas-tugas yang diembannya.⁶ Mengingat KPU adalah penyelenggara pemilu, dan agar pemilu dapat terselenggara dengan baik serta meminimalisir kesalahan maupun pelanggaran-pelanggaran selanjutnya adapun peraturan KPU nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

⁵Waslam Mukhsid, “Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014”, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2015) <https://doi.org/10.20884/jih.v1i2.22>.

⁶*Ibid*, 87.

Bupati Dan / Atau Walikota Dan Wakil walikota pada bab II tentang tujuan dan prinsip partisipasi masyarakat :⁷

Di Indonesia KPU tersebar di setiap kota atau provinsi salah satunya KPU Provinsi Lampung .KPU Provinsi lampung memiliki sistem pada umumnya seperti Komisi Provinsi Lampung lainnya. Lalu di dalam Komisi Provinsi lampung memili pelaksanaan yang sama seperti KPU lainnya dan selanjutnya bagaimana Upaya Komis Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam melaksanakan sistematika pemilihan.

Latar belakang masalah terkait upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan DPRD Provinsi Lampung tahun 2019, dalam perspektif Fiqih Siyasa, dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum seringkali menjadi tantangan utama, dimana sebagian masyarakat mungkin tidak merasa termotivasi atau kurang memiliki kesadaran politik. Kedua, ketidapahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilihan dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan turut berperan sebagai faktor penghambat. Ketiga, faktor budaya dan sosial dapat memengaruhi keterlibatan aktif dalam politik, baik melalui norma-norma sosial maupun tradisi tertentu. Keempat, tingginya tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilihan dan politisi bisa menjadi penghambat serius, dipicu oleh skandal politik, korupsi, atau persepsi tidak adil dalam pemilihan sebelumnya. Kelima, tingginya angka golput juga menjadi isu utama, dimana alasan golput bermacam-macam, termasuk rasa apatis, ketidakpuasan terhadap calon atau sistem politik, atau ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan. Dalam perspektif Fiqih Siyasa, upaya KPU perlu mencakup nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pemilihan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika politik Islam seperti kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas. Strategi

⁷Lia Octavia Et Al., “Sosialisasi Politik Virtual Pada Pemilihan Walikota dan Wakil wali Kota Bandar Lampung tahun 2020 (Studi Pada Pemilih Pemula Melalui Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) WALIKOTADANWAKILW”, *UIN Rden Intan Lampung*, Vol. 0 (2021).10

edukasi yang efektif, melibatkan pemuka agama, dan langkah-langkah transparansi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan DPRD Provinsi Lampung tahun 2019 dan pemilihan-pemilihan berikutnya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan skripsi yang berjudul “Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”.

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah “Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”. Adapun Sub fokus penelitiannya ialah sebagai berikut:

1. Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan pada masyarakat di Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*”
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan pada masyarakat di Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian-uraian dari pemaparan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun

2019 Dalam Perspektif *Fiqih Siyasa*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan pada masyarakat di Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif *Fiqih Siyasa*” .
2. Untuk mengetahuitinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan pada masyarakat di Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif *Fiqih Siyasa*” (studi di Komisi pemilihan umum provinsi lampung)

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pihak yang terkait utamanya pihak – pihak berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari’ah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- b. Dapat menerapkan ilmu yang telah diterapkan selama kuliah dan menambah pengalaman dalam mengajar khususnya dalam bidang hukum tata negara.

G. Kajian penelitian Terdahulu yang relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Rausyan Fikri berasal dari Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berjudul Analisis *Fiqh Siyâsah* Terhadap Strategi KPU dalam Menekan Angka Golongan Putih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di KPU Kota Bandar Lampung) skripsi ini membahas tentang bagaimana strategi KPU (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 dan tinjauan *fiqh siyâsah* terhadap strategi KPU (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kota Bandar Lampung.⁸ Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan penelitian *field research* atau terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya, metode pengumpulan datanya juga sama, yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya, pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya adalah Analisis *Fiqh Siyâsah* Terhadap Strategi KPU dalam Menekan Angka Golongan Putih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di KPU Kota Bandar Lampung) Sedangkan Penelitian ini tentang analisis *fiqh siyâsah* terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan pada masyarakat di Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif *Fiqh Siyâsah*” (studi di Komisi pemilihan umum provinsi lampung)
2. Skripsi yang ditulis oleh Mochamad Fadly Gintara adalah mahasiswa dari Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul Strategi Sosialisasi KPU Kota Tangerang dalam Peningkatan

⁸M. Rausyan Fikri, “Analisis Fiqh Siyâsah Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golongan Putih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) Skripsi”, *Uin Rden Intan Lampung*, Vol. 2019 (2020).

Partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 membahas tentang bagaimana strategi sosialisasi KPU Kota Tangerang dalam meningkatkan partisipasi Pemilu tahun 2019 dan faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan partisipasi pemilu di Kota Tangerang tahun 2019.⁹ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, objek penelitian sebelumnya adalah strategi sosialisasi KPU Kota Tangerang dalam peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2019. Sedangkan objek penelitian ini adalah tentang. Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan pada masyarakat di Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*⁷ (studi di Komisi pemilihan umum provinsi lampung) Kemudian perbedaan lokasi tempat penelitian, penelitian sebelumnya berada di KPU Kota Tangerang, sedangkan penelitian ini berada di KPU Provinsi Lampung.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mochamad Fadly Gintara mahasiswa dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul Efektivitas Sosialisasi Pemilihan DPRD Provinsi dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih di KPUD Kota Medan, membahas tentang bagaimana efektivitas sosialisasi Pemilihan DPRD Provinsi dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kota Medan.¹⁰ Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, terjun ke

⁹Mochamad Gintara, Fadly, *Strategi Sosialisasi KPU Kota Tangerang Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2019, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55641>.

¹⁰Hermansyah Lubis, "Efektivitas Sosialisasi Pilkada Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Kpud Kota Medan," *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2018, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3493>.

lapangan. Selanjutnya metode pengumpulan datanya juga sama, yaitu melakukan wawancara dengan narasumber. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya, pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya adalah tentang efektivitas sosialisasi Pemilihan DPRD Provinsi dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kota Medan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan pada masyarakat di Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif *Fiqih Siyasa*” (studi di Komisi pemilihan umum provinsi lampung) .selain itu juga terletak di lokasi penelitian, penelitian sebelumnya di KPUD Kota Medan, sedangkan penelitian ini berlokasi di KPU Provinsi Lampung.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Muhtaruddin mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten, Penelitian yang berjudul Peran KPU Kota Tangerang dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Gubernur 2017 membahas tentang Peran komunikator dalam menekan angka golput pada Pemilihan Gubernur Banten 2017 dan bagaimana pengelolaan pesan yang dilakukan KPU Kota Tangerang dalam menekan angka Golput pada Pilgub Banten 2017. ¹¹Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis penelitiannya, yaitu penelitian hukum empiris. Data diperoleh peneliti sebelumnya dengan cara mengadakan kontak langsung dengan informan atau dalam arti cara yang ditempuh untuk memperoleh data dengan cara melakukan wawancara dengan sumber-sumber yang terkait. perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, pada penelitian sebelumnya objek penelitian membahas tentang peran KPU Kota

¹¹Muhamad Muhtaruddin, “Peran Kpu Kabupaten Tanggerang Dalam Menekan Angka Golput Pada Pemilihan Gubernur 2017 Serang–Banten”, *Universitas Ageng Tirtayasa*, 2019 (On-Line), Tersedia Di: [Http://Repository.Fisip-Untirta.Ac.Id/1408/1/Peran Kpu Kabupaten Tangerang Dalam Menekan Angka Golput Pada Pemilihan Gubernur 2017 - Copy.Pdf](http://Repository.Fisip-Untirta.Ac.Id/1408/1/Peran_Kpu_Kabupaten_Tangerang_Dalam_Menekan_Angka_Golput_Pada_Pemilihan_Gubernur_2017_-_Copy.Pdf) (2019).

Tangerang dalam menekan angka golput pada Pemilihan Gubernur 2017. Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan pada masyarakat di Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif *Fiqih Siyasa*” (studi di Komisi pemilihan umum provinsi lampung).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada pengamatan sosial. Observasi digunakan guna menambah dan melengkapi data-data yang dibutuhkan. Dan pengumpulan data-data dilakukan melalui wawancara, melihat fakta di lapangan dan dokumentasi.¹²

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bersifat analisis. Yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tulisan, dengan melihat dan mengamati guna dapat menganalisis dengan cermat agar dapat memperoleh sebuah kesimpulan sebagai hasilnya.¹³

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Sumber data primer diperoleh langsung melalui wawancara terhadap responden secara langsung.¹⁴ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah KPU Kota Bandar Lampung.

¹²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Ke 19 (Bandung: Alfabeta, 2013),34.

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, XXXV (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016),21.

¹⁴*Ibid*,22.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain yang mendukung data dari sumber primer melalui studi kepustakaan, Jurnal ilmiah, Buletin, Al-qur'an, Hadist dan literatur-literatur lainnya yang mendukung tentang penelitian pada judul skripsi ini.¹⁵

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 30 Orang Mencakup seluruh Anggota KPU Provinsi Lampung dan Masyarakat Lampung.¹⁶

b. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.¹⁷Populasi menggunakan tehnik *purposive sampling* yaitu tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁸Pada Penelitian ini sampel yang diambil 8 orang pada penelitian ini.yaitu, 2 (dua) Orang KPU Ketua,sekertaris dan 2 (dua) orang di bidang Sodialisai Serta 4 (Delapan) Anggota KPU Provinsi Lampung serta dari masyarakat dapil 4 ada 4 (empat) orang (tanggamus,lampung barat dan pesisir barat) dan 2 (dua) orang dari Dapil 2 (Lampung Selatan) . 14 orang pada penelitian ini.Alasan mengambil sampel tersebut

¹⁵Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Ke 19 (Bandung: ALFABETA, 2013).

¹⁶ Ibid., 45

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

¹⁸Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2014),23.

karena narasumber tersebut yang paling mengetahui dan paham yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Metode wawancara ini adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.¹⁹ Pokok bagi penulis dalam memperoleh data-data dari tempat penelitian yang aktual dan terpercaya di dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan Upaya KPU Provinsi Lampung Dalam Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan DPRD Provinsi) Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di KPU Provinsi Lampung).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hasil dari pencatatan yang dihasilkan dari teknik observasi dan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti.²⁰ Data-data ini berupa, catatan-catatan dokumen, surat-surat dan buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data sudah terkumpul seperti diatas, maka untuk langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012),87.

²⁰Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti setelah data tersebut terkumpul.

- b. Penandaan data (*coding*) yaitu mengklarifikasikan jawaban jawaban dari responden ke dalam kategori-kategori.
- c. sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urusan masalah.²¹

6. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, kemudian menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka. Hal ini disebabkan oleh penerapan metode kualitatif, dengan demikian laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi penyajian laporan tersebut. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara di lapangan, dokumentasi serta data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis juga menggunakan analisis data secara induktif. Metode induktif yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus lalu kepada yang umum. Dan penulis mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

dalam mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

Bab I : Pendahuluan terdiri penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²¹Zarah Puspitaningtyas Agung Widhi Kurniawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016).

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori yang meliputi; *Fiqh Siyâsah*, dan *Fiqh Tanfiziyah*. Bab III : Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini menjelaskan Sejarah KPU Provinsi Lampung , Visi Dan Misi KPU Provinsi Lampung serta Tujuan dan Program Kerja serta Peran KPU Provinsi Lampung.

Bab IV : Analisis Data, membahas upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan pada masyarakat di Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 Dalam Perspektif *Fiqh Siyâsah*” (studi di Komisi pemilihan umum provinsi Lampung) dan Tinjauan *Fiqh Siyâsah* terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan pada masyarakat di Pemilihan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019

Bab V : Penutup, sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

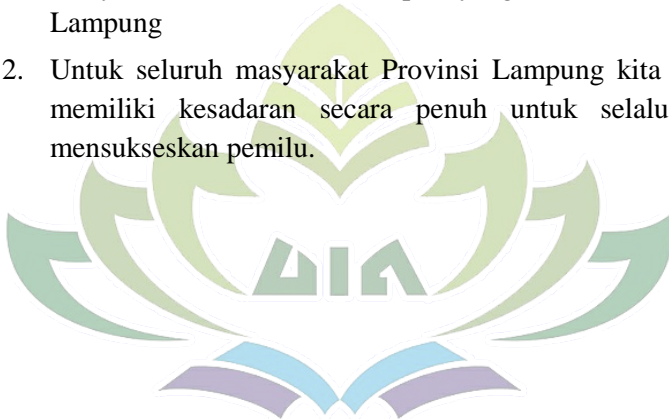
1. Upaya KPU Provinsi Lampung Dalam Partisipasi Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 adalah bekerja sama dengan semua stekholder baik dengan seluruh anggota KPU di Provinsi Lampung ataupun dengan semua lapisan masyarakat. Melakukan Pendidikan Pemilih. KPU Provinsi Lampung melakukan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pendidikan pemilih tersebut dilakukan melalui pemanfaatan media sosial, pembentukan rumah pintar pemilu dan pembentukan agen atau relawan demokrasi. Memberikan informasi. KPU Provinsi Lampung menyampaikan informasi terkait pemilu kepada masyarakat dengan melalui media massa cetak dan elektronik. Dan memberikan kesempatan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi maka KPU juga memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang baik penyandang disabilitas maupun sebaliknya bagi yang tidak memiliki pendamping bisa didampingi oleh KPPS.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Partisipasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 adalah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu prinsip pemilihan kepala daerah dalam Islam lebih cenderung diperspektifkan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat. Pemimpin menurut Islam dijabarkan kedalam dua istilah, yang pertama yaitu khalifah sebagaimana terdapat dalam QS. Al - Baqarah/2: 30. Kemudian yang kedua adalah Imamah (Imam) yang tercantum dalam QS. Al-Furqan/25: 74. Menjadi pemimpin menurut Islam adalah suatu amanah. Amanah tersebut harus dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Allah, dan secara horizontal kepada

sesama manusia. Dalam menjalankan kekuasaan atau kepemimpinan harus berlandaskan pada kepentingan rakyat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Upaya KPU dalam Partisipasi Pemilu DPRD di Provinsi Lampung. Maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. KPU harus lebih memperketat pengawasan terhadap relawan demokrasi yang telah diberikan amanah untuk melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah yang ada di Provinsi Lampung agar sosialisasi yang dilakukan dapat menyeluruh di seluruh tempat yang ada di Provinsi Lampung
2. Untuk seluruh masyarakat Provinsi Lampung kita harus memiliki kesadaran secara penuh untuk selalu ikut mensukseskan pemilu.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer. Jakarta: Rajawali Pers, n.d.
- . *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Tiara Wacana, 2010.
- Abu A'ala Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 2013.
- Ahmad Sukardja. *Piagam Madinah Dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: UI Press, n.d.
- Bernard Lewis. *The Political Language of Islam*. Chicago: The University of Chicago Press, 2005.
- Dede Rosyada. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial: Di Rasas Islamiyah III*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2010.
- Gintara, Fadly, Mochamad. *Strategi Sosialisasi KPU Kota Tangerang Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019*. Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2019.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55641>.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 123–34. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Ibnu Taimiyah. *Ra'iyah, As Siyasah As Syar'iyah Fi Ishlah Ar Ra'i*. Beirut: Dar Al Kutub al Arabiyah, n.d.
- Kasman Singodimedjo. *Masalah Kedaulatan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2013.
- Kurniawan, Zarah Puspitaningtyas Agung Widhi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Lendrawati. "Khilafah, Ijarah Dan Imamah Dalam Konstelasi Politik Islam: Analisis Komperatif Tentang Wacana Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan." *Al-Ahkam XXII*, no. 2 (2021): 117–32.

<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/download/3618/2292>.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. XXXV. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Lubis, Hermansyah. “Efektivitas Sosialisasi Pemilihan DPRD Provinsi Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Kpud Kota Medan.” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2018.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3493>.

M. RAUSYAN FIKRI. “ANALISIS FIQH SIYÂSAH TERHADAP STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENEKAN ANGKA GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) SKRIPSI.” *UIN Rden Intan Lampung* 2019 (2020).

Marzuky Wahid dan Humadi. *Fiqh Madzhab Negara*. Yogyakarta: LKSI, 2002.

Mohammad Hatta. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyash “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

———. *Fiqh Siyash Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muhtaruddin, Muhamad. “Peran KPU Kabupaten Tangerang Dalam Menekan Angka GOLPUT Pada Pemilihan Gubernur 2017 Serang–Banten.” *Universitas Ageng Tirtayasa*, 2019.
[http://repository.fisip-untirta.ac.id/1408/1/PERAN KPU KABUPATEN TANGERANG DALAM MENEKAN ANGKA GOLPUT PADA PEMILIHAN GUBERNUR 2017 - Copy.pdf](http://repository.fisip-untirta.ac.id/1408/1/PERAN_KPU_KABUPATEN_TANGERANG_DALAM_MENEKAN_ANGKA_GOLPUT_PADA_PEMILIHAN_GUBERNUR_2017_-_Copy.pdf).

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

- Mukhsid, Waslam. "Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014." *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.20884/jih.v1i2.22>.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Mutiara Fahmi. *Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam*. Bandung: gramedia, 2018.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Octavia, L I A, Fakultas Ushuluddin, D A N Studi, Universitas Islam Negeri, and Raden Intan Lampung. "SOSIALISASI POLITIK VIRTUAL PADA PEMILIHAN W A L I K O T A D A N W A K I L W A L I K O T A B A N D A R L A M P U N G T A H U N 2 0 2 0 (Studi Pada Pemilih Pemula Melalui Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) W A L I K O T A D A N W A K I L W ." *UIN Rden Intan Lampung* 0 (2021).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Samsu, La. "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah." *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.
- Sohari H. Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Ke 19. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*.

depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Suyuthi Pulungan. *MA Dalam Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Toha Andiko. "PEMBERDAYAAN QAWÂ'ID FIQHIYYAH DALAM PENYELESAIAN MASALAH-MASALAH FIKIH SIYASAH MODERN Toha." *AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014 Terus*, n.d.

Ufinit, Yustinus, Agung Suprojo, and Dody Setyawan. "Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan DPRD Provinsi) Kota Malang." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 3, No. no. 1 (2014): 1–8. www.publikasi.unitri.ac.id.

Utami Munandar. *Kreativitas Dan Kebakatan*. Jakarta: Grasindo Pustaka Utama, 2015.

Yulianto ; Veri Junaidi. *August Mellaz, Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, n.d.

